



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PENGHULU DI KEPENGHULUAN BALAM JAYA KECAMATAN BALAI JAYA

Oleh : Lisa Nova

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam pengimplementasian kebijakan pemilihan penghulu, serta untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan penghulu di Kepenghuluhan Balam Jay. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu diukur dengan 3 indikator, yaitu Persiapan Pemilihan Penghulu, Pencalonan Penghulu, dan Tahapan Kampanye. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) Kepenghuluhan Balam Jay. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diambil menggunakan rumus slovin berjumlah 100 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 kurang optimal karena semua dikategorikan “sedang” yaitu dimulai dari indikator Tahapan Persiapan Pemilihan Penghulu dengan ($mean = 3,04$) lebih tinggi berbanding dengan Tahapan Pencalonan Penghulu ($mean = 2,89$). Sedangkan yang paling rendah adalah indikator Tahapan Kampanye dengan ($mean = 2,60$). Dari hasil penelitian yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 adalah sumber daya *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Dispositions or attitudes, and* (Disposisi atau Sikap), dan *Bureaucratics Structure* (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan penghulu di Kepenghuluhan Balam Jay adalah adanya pengaruh karakteristik kepribadian pemilih, sistem politik yang tidak demokratis, rendahnya kepercayaan politik, dan rendahnya sosial ekonomi

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Pemilihan Penghulu.*